



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 56/HK.03.1/53/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memastikan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan;
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana;

- e. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- f. Tim Penguatan Pengawasan;
- g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- h. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana aksi kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



YOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR 56/HK.03.1/53/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Thomas Dohu	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Drs. Yosafat Koli	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Jeffry A. Galla	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Fransiskus V. Diaz	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Kusmanto Riwu Djo Naga	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Simon Arfaksad Lau	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Brigitha de Rosari	Pelaksana di Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Wiwi D. Un Banunaek	Pelaksana di Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Linda Benyamin	Pelaksana di Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Agustina J. Touselak	Pelaksana di Subbagian Keuangan	Anggota	
6.	Siti Zaenab	Pelaksana di Subbagian Program dan Data	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Yosef Hardi Himan	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT; b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT.
2.	Banla Y.P. Kinanggi	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Angeli Lake	Pelaksana di Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
4.	Maria E. Silla	Pelaksana di Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5	Emerensiana Purnawati	Pelaksana di Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Ahmad Banaji	Pelaksana di Subbagian Hukum	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Benedikta G.K. Atie	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Ari Praptiningsih	Pelaksana di Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Julio Redha Pratama	Pelaksana di Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Hersindy A. Serang	Pelaksana di Subbagian Program dan Data	Anggota	
5.	Cornelia W. Jita Pati	Pelaksana di Subbagian Keuangan	Anggota	
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Agustinus Y. Ola Paon	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Bathseba S. Dapatalu	Pelaksana di Subbagian Program dan Data	Anggota	
3.	Sri Mulyawati	Pelaksana di Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Agatha M.S. Woda	Pelaksana di Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
5.	S. Anedo Pradipta Nugroho	Pelaksana di Subbagian Program dan Data	Anggota	
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA				
1.	Andrew S. N. Kette	Kepala Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; b. Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi; c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
2.	Bernadete Ose Bolen	Pelaksana di Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Yoseph Dopo	Pelaksana di Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Kain Jella	Pelaksana di Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
5.	Pedro De Sa	Pelaksana di Subbagian Program dan Data	Anggota	
6.	Elsa Diana Tambunan	Pelaksana di Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Carolus F. Dengi	Pelaksana di Subbagian Keuangan	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Assurance dan Consulting.
2.	Siti Samsiah U. Ratu Loly	Pelaksana di Subbagian Keuangan	Anggota	
3.	Novenda Tehusalawanny	Pelaksana di Subbagian Keuangan	Anggota	
4.	Tati Haryati B. Husein	Pelaksana di Subbagian Program dan Data	Anggota	
5.	Prasetyo Harry Wuryanto	Pelaksana di Subbagian Keuangan	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Peiter G. Nappoe	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT.
2.	Tinekowati H. Neno	Pelaksana di Subbagian Program dan Data	Anggota	
3.	Abraham Frans Benyamin	Pelaksana di Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
4.	Zenco F. Suki	Pelaksana di Subbagian Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Steven Solukh	Pelaksana di Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Septy Riayanti Saragih	Pelaksana di Subbagian Keuangan	Anggota	
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Agustinus Y. Ola Paon	Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
2.	Lusia A.D.P. Hekopung	Pelaksana di Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
3.	Philip G. Adjid	Pelaksana di Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Anneke A.S. Raga	Pelaksana di Subbagian Program dan Data	Anggota	
5.	Bollivardo Rafly Liha	Pelaksana di Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Kusmanto Riwu Djo Naga	Sekretaris KPU	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan; b. Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; c. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada
2	Agustinus Y. Ola Paon	Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian Perencanaan, Program dan Data	
3.	Peiter G. Nappoe, S.Kom	Kepala Sub bagian Program dan Data	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Banla Y.P. Kinanggi	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan d. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
5.	Andrew S. N. Kette	Kepala Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



YOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 56/HK.03.1/53/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

RENCANA AKSI KEGIATAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Manajemen Perubahan	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1 Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan.	1 Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi.		✓										
			2 Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental.	2 Kegiatan <i>kick off</i> (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi.			✓									
			3 Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas.	3 Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali.					✓							

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2 Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1 Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan rencana aksi.	1 Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.						✓					✓	
			2 Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan.	2 Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun.							✓					
			3 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal.	3 Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	1 Harmonisasi Peraturan Perundangundangan /produk hukum satuan kerja	1 Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	1 Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2 Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	2 Revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2 Sistem Pengendalian dan Penyusunan produk hukum satuan kerja	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Hukum	Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Penguatan Kelembagaan/ Organisasi	1 Reorganisasi	1 Klasterisasi Sekretariat	1 Terisinya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai Klaster			✓	✓			✓	✓	✓			
			2 Alih Status	2 Menurunnya jumlah pegawai DPK								✓				
		2 Badan Ad Hoc	1 Rekrutmen Badan Ad Hoc	1 Terbentuknya PPK, PPS, dan KPPS			✓			✓	✓	✓				
			2 Bimbingan Teknis	2 Menurunnya jumlah sengketa Pemilu/ Pemilihan				✓	✓	✓	✓	✓	✓			

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Penguatan Tata Laksana	1 Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	1 Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan (SAIBA;SAS;SIMONIK A;SIMPHONY;SIMAK; SIMAN;SIRUP;SIAP KPU;SAKTI;SMART;E-MONEV;SIDALIH;E-LAPKIN;SIPP;SAPK;SI P-RENJA;SILON;SITUNG;SIMPAW;E-PPID;SIPARMAS;SIPOL;SIDAKAM)	1 Operator mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2 Pengisian berbagai aplikasi	2 100% (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2 Implementasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	1 Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1 Tersedianya struktur PPID di tingkat satuan kerja												

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2 Pelaksanaan kegiatan PPID	2 Pemenuhan permintaan terhadap Informasi dan dokumentasi			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			3 Penyusunan dan Penyampaian Laporan PPID	3 Tersedianya laporan pelaksanaan PPID											✓	✓
		3 Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU	1 Penerapan sistem arsip	1 Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2 Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	2 Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah			✓									
		4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana KPU	1 Penyusunan Standar Operasional (SOP)	1 SOP seluruh unit kerja telah tersusun			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2 Pelaksanaan SOP	2 SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5 Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU	Evaluasi pelaksanaan SOP	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP						✓						✓

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	1 Perencanaan kebutuhan	1 Penyusunan peta jabatan	1 Tersedianya peta jabatan				✓								
			2 Pengisian pegawai sesuai dengan petunjuk	2 Tercapainya restrukturisasi pegawai 35 (tiga puluh lima) pegawai provinsi dan 17 (tujuh belas) pegawai Kabupaten/kota			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2 Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal	Tercapainya restukturisasi pegawai 35 (tiga puluh lima) pegawai provinsi dan 17 (tujuh belas) pegawai Kabupaten/kota			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3 Sistem rekrutmen	Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (pegawai non PNS)	Adanya sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (termasuk untuk pegawai non PNS)											✓	✓
		4 Sistem promosi secara terbuka	Promosi jabatan terbuka	Terselenggaranya kegiatan promosi secara terbuka				✓					✓	✓		

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5 Penilaian kinerja pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	Seluruh PNS melaksanakan SKP			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		6 <i>Reward and punishment</i> berbasis kinerja	1 Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja	1 Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan												✓
				2 Tersedianya laporan dan dokumentasi kekuatan Pemilihan pegawai teladan												✓
			2 Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Tersedianya laporan penegakan disiplin												✓
		7 Sistem Informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara <i>online</i>	100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		8 Sistem pengkaderan pegawai ASN	Pelaksanaan kegiatan <i>knowledge sharing</i> bagi peserta diklat dan bimbingan teknis	Laporan kegiatan <i>knowledge sharing</i> di lingkungan satuan kerja			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu			✓									

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu			✓								
		3	Peningkatan kompetensi akuntabilitas	Pelatihan akuntabilitas kinerja	Terlaksananya kegiatan pendidikan/ bimbingan teknis/ pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di lingkungan sekretariat											
7	Penguatan Pengawasan	1.	Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan	Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja	Terlaksananya Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja			✓								
		2.	Pembangunan Sistem Pengawasan Intern	1	Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)			✓								
				2	Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi:			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				a.	menetapkan lingkungan pengendalian;				✓		✓			✓		
				3.	Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian.											

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			b. melakukan penilaian resiko;					✓								
			c. melakukan kegiatan pengendalian;				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			d. melakukan informasi dan komunikasi pengawasan; dan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			e. melakukan pemantauan pengendalian intern.				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	1. Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat	2. Tersedianya Laporan pengelolaan pengaduan masyarakat			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Penerapan pelayanan satu atap KPU Provinsi NTT	1 Kebijakan standar pelayanan	1 Tersedianya standar pelayanan												
			2 Penyusunan maklumat pelayanan	2 Tersedianya maklumat pelayanan												
			3 Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan	3 Tersedianya SOP pelayanan			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
			4 Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	4 Pelayanan terpadu dalam satu tempat				✓								
		2 Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1 Pendidikan bagi para pemilih	1 Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2 Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2 Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3 Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	3 Pengelolaan pengaduan masyarakat	1 Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2 Tersedianya SOP pelayanan pengaduan			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
				3 Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk									✓	✓	✓	✓
		4 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	4 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan	4 Adanya kebijakan dimasing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan												✓

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Humas dan Sumber Daya Manusia,

